

# **PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG FUNGSI DAN MEKANISME PAJAK**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapat  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)  
Pada Jurusan Ekonomi Islam**



**Oleh:**

**ABDUL HASIS  
10625003844**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
R I A U  
2010**

## ABSTRAK

Penulis meneliti Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Fungsi dan Mekanisme Pajak. Dalam pemikiran pajak Ibnu Khaldun sangat menekankan keadilan dalam pengelolaan atau pendistribusian pajak baik fungsi, manfaat serta mekanisme pajak.

Kebijakan fiskal yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Dan kebijakan fiskal tersebut memiliki dua instrument, pertama : kebijakan pendapatan, kedua : kebijakan belanja. Dalam sejarah kita akan dapatkan ulama-ulama yang memberi kontribusi besar atas perkembangan pemikiran ekonomi syari'ah. Dalam bidang publik finance. Ibnu Khaldun yang tidak dapat kita sampingkan kontribusi pemikirannya yang terkenal dengan *Muqoddimah*nya.

Dalam pemikiran Ibnu Khaldun kita akan dapatkan berisi kajian tentang sejarah, filsafat dan ekonomi yang bersifat empirik. Ibnu khaldun mengungkapkan teorinya bahwa Ia melihat keadaan yang terjadi disekelilingnya serta perjalanan hidupnya, yang dilandasi dengan sistematika dan mekanisme distribusi pajak sebagai fenomena yang terjadi dikalangan masyarakatnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak, untuk mengetahui bagaimana fungsi serta mekanisme pajak menurut Ibnu Khaldun serta untuk mengetahui apasaja manfaat pemikiran pajak Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*nya

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analitik, Deduktif, dan Komperatif.

Pemungutan pajak yang diambil dari masyarakat maka sewajarnya dikembalikan kepada masyarakat sehingga rakyat dapat merasakan nilai ril dari manfaat pajak yang telah dijalankan

Dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan manajemen pajak yaitu baik dari segi fungsi, manfaat serta mekanismenya. Sehingga masyarakat yakin

akan pemerintah yang mengakibatkan membawa dampak yang positif yaitu masyarakat akan rajin membayar kewajiban mereka sehingga meningkat pendapatan Negara.

Selanjutnya mekanisme pajak Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pendapatan serta pengeluaran pajak harus tertata dengan jelas. Sehingga pajak tersebut terarah pada tujuannya. Dalam hal ini petugas pajak harus memiliki sifat *tasamuh* (persamaan) dan *tabayun* (kejelasan) atau transparansi terutama didalam pendistribusian pajak tersebut, setelah itu akan tercapai keadilan sedangkan keadilan yang akan membawa masyarakat yang tenang dan sejahtera.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan .....	8
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II    BIOGRAFI IBNU KHALDUN.....</b>	<b>11</b>
A Kelahiran Ibnu Khaldun.....	11
B. Perjalanan dan Karir Ibnu Khaldun .....	14
C. Karya-Karya Ibnu Khaldun.....	19
D. Sekilas Tentang Pemikiran Sosial Ekonomi .....	22
<b>BAB III    TINJAUAN PAJAK SECARA UMUM.....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Pajak Secara Umum .....	25
B. Fungsi Pajak .....	26
C. Syarat Pemungutan Pajak .....	27
D. Mekanisme Pemungutan Pajak.....	27
E. Pajak Dalam Islam.....	30

a. Pengertian Pajak Menurut Syari'at.....	30
b. Defenisi Pajak Menurut Syari'at .....	32
c. Krakteristik Pajak Menurut Syari'at.....	35
d. Ulama Yang Berpendapat Bahwa Pajak itu Boleh.....	36
e. Alasan Ulama Tentang Kebolehan Pajak .....	38
f. Persamaan dan Perbedaan antara Zakat dengan Pajak.....	38
 <b>BAB IV   PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG FUNGSI DAN</b>	
<b>          MEKANISME PAJAK .....</b>	<b>42</b>
A. Dasar Pemikiran Pajak Ibnu Khaldun.....	42
1. Pengertian Pajak Menurut Ibnu Khaldun.....	42
2. Landasan Pemikiran Ibnu Khaldun.....	43
B. Fungsi dan Mekanisme Pajak Menurut Ibnu Khaldun.....	45
C. Manfaat Pemikiran Tentang Fungsi dan Mekanisme Pajak Ibnu	
Khaldun .....	55
 <b>BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Dan kebijakan fiskal tersebut memiliki dua instrument, pertama : kebijakan pendapatan, yang tercermin dari kebijakan pajak, kedua : kebijakan belanja. Kedua instrument tersebut akan tercermin dalam anggaran belanja Negara. Kebijakan fiskal adalah bagian dari kebijakan dari ekonomi suatu Negara yang tidak dapat berdiri sendiri dalam pencapaian tujuan-tujuan ekonomi, kebijakan penting lainnya adalah kebijakan moneter.

Kebijakan fiskal akan sangat bergantung pada dua instrumen tersebut, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Kinerja kebijakan fiskal antara satu negara dengan lainnya akan sangat berbeda. Ketidak samaan tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dan falsafah ekonomi yang dianut. Dalam masyarakat ekonomi tertinggal misalnya, kebijakan fiskal biasanya bertujuan bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka investasi dan menjaga keseimbangan harga menjadi prioritas utama. Sedangkan masyarakat ekonomi kapitalis yang maju biasanya kebijakan fiskal akan terfokus pada pencapaian dan penstabilan ekonomi serta pemanfaatan atau kesempatan penuh tenaga kerja.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M.A Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dan Bahkti Wakaf). h. 230

Jika kita menggali konsep Islam mengenai peranan pemerintah dalam perekonomian, akan kita dapatkan bahwa salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam adalah “ *Multy Ownership* “ yang berarti Islam mengakui multi kepemilikan. Ia mencakup kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan pemerintah. Dengan keyakinan bahwa semua bentuk kepemilikan tersebut hanyalah merupakan amanah, yang diberikan Allah, sebagaimana firman Allah menyatakan. :



“*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar*”.(Al-Taghabun:15).<sup>2</sup>

Dari ayat ini jelas bahwa manusia tidak memiliki harta secara mutlak sehingga dalam pandangan harta terdapat hak orang lain seperti zakat, pajak dan yang lainnya. dan hanya Allah lah pemilik mutlak dari harta yang kita miliki. Maka berdasarkan konsep Islam mengenai kepemilikan tersebut kita akan dapatkan bahwa apa yang diyakini oleh ekonomi modren mengenai peranan pemerintah dalam kebijakan ekonominya, telah diterapkan oleh Islam semenjak Rasulullah SAW sebagai penggagas Madinah yang kemudian dikembangkan pelanjutnya, dengan selalu merujuk kepada kaedah umum yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan as-sunnah.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang, Toha Putra, 1989), h. 942

Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk, sedangkan pengeluaran yang dilakukan pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, pertama : pengeluaran konsumsi pemerintah yang pengeluarannya meliputi seperti membayar gaji para pegawai negeri, dan pembelian barang dan jasa- jasa dalam berbagai bentuk. kedua : untuk pengeluaran umum pemerintah seperti pembangunan jembatan, jalan raya, rumah sakit dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam konteks ekonomi modern pajak adalah merupakan satu-satunya sektor pendapatan terpenting dan terbesar dengan alasan bahwa pendapatan tersebut dialokasikan pada “*public goods*” dan memiliki tujuan sebagai alat redistribusi, dan sebagai alat penstabilan ekonomi dan pertumbuhan. Dalam terminologi ekonomi modern diyakini bahwa penambahan beban pajak disaat pendapatan masyarakat semakin bertambah akan mengakibatkan semakin bertambahnya permintaan. Hal ini akan mampu mendorong kenaikan harga.

Adapun seandainya pungutan pajak tersebut dibolehkan juga dalam Islam maka kaidahnya adalah harus berdasarkan pada kaidah ‘*adalah*’ dan kaidah *dorurah* yaitu pungutan tersebut hanya bagi orang yang mampu atau kaya, dan untuk pembiayaan yang betul-betul sangat diperlukan.

Kajian tentang sejarah sangat penting bagi ekonomi karena sejarah adalah laboratorium bagi manusia. Ekonomi, sebagai salah satu ilmu sosial perlu kembali kepada sejarah agar dapat melaksanakan eksperimen-

---

<sup>3</sup> Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006). h. 88-90



eksperimennya dan menurunkan kecenderungan-kecenderungan jangka jauh dalam berbagai ubahan ekonominya. Sejarah memberikan dua aspek utama kepada ekonominya, yaitu sejarah pemikiran ekonomi dan sejarah unit-unit ekonomi seperti individu-individu, badan-badan usaha dan ilmu ekonomi itu sendiri.

Dalam sejarah kita akan dapatkan ulama-ulama yang memberi kontribusi besar atas perkembangan pemikiran ekonomi syari'ah. Dalam bidang publik finance yang erat kaitannya dengan kebijakan fiskal tercatat tokoh-tokoh seperti Abu Yusaf (731-798 M) dengan karyanya "*al-kharaj*" yang berbicara masalah pajak yang proporsional atas hasil pertanian dari tanah *kharaj*. Dalam sektor pembelanjaan Abu Yusuf menekankan akan pentingnya pembangunan infra struktur yang diperlukan masyarakat seperti irigasi, jembatan dan sebagainya. Kemudian ulama lainnya adalah Imam Al Ghazali dan Ibnu Khaldun yang tidak dapat kita sampingkan kontribusi pemikirannya yang terkenal dengan *Muqoddimah*nya.<sup>4</sup>

Ibnu Khaldun dikenal banyak melahirkan pemikiran-pemikiran sosial yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan keseharian. Ibnu Khaldun yang lahir di Tunisi (1332-1406 M), empat tahun setelah meninggalnya Ibnu Taimiyah<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Monzer Khaf, *Ekonomi Islam :Telaah Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Islam*, (terj), Macnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995). h. 8

<sup>5</sup> A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Timiyah*, (terj) Anshari Tayib, ( Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997). h. 61

Salah satu pemikiran sosial Ibnu Khaldun yang erat hubungannya dengan kehidupan keseharian adalah perpajakan. Ibnu Khaldun tidak memberikan pengertian pajak secara eksplisit dalam kitab-kitabnya. Ibnu Khaldun menekankan prinsip-prinsipnya tentang perpajakan dalam *Muqoddimah* dengan tegas. Ia mengutip sebuah surat ditulis oleh Tharikh ibnu al-Husayn, seorang jenderal dari khalifah al-Ma'mun yang memberikan nasehat kepada anaknya yaitu Abdullah Ibnu Thahir, seorang Gubernur di ar-Raqqah (Syria) "maka bagikianlah (pajak) kepada semua rakyat dengan adil dan wajar diberlakukan secara umum kepada siapa saja tanpa mengecualikan seseorang karena kehormatan dan kekayaan, dan tidak mengecualikan sekalipun pegawaimu sendiri atau para keluarga istana atau para pengikutnya. Dan janganlah membebani seseorang dengan pajak yang diluar kemampuan orang tersebut untuk membayarnya"<sup>6</sup>. Dalam hal ini Ia menekankan prinsip kesamarataan dan kenetralan dan yang khususnya tentang pentingnya sistem pajak yang tidak menindas.

Ibnu Khaldun seorang tokoh besar yang berfikir tentang sosiologi yang dirangkum dalam sebuah karyanya yang monumental (*Muqaddimah*). Sosiologi merupakan ilmu yang mengacu pada kemasyarakatan atau hal-hal yang menyangkut hubungan intraksi kemasyarakatan pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu poin penting yang menarik adalah pembahasan pajak yang menyangkut dengan hajat orang banyak.

---

<sup>6</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics An Islamic Perspective (Landcape Baru Perekonomian Masa Depan*, (Jakarta : Penerbit SEBI , 2001) h. 167

Perekonomian yang makmur di awal suatu pemerintahan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi<sup>7</sup>. Alasan terjadinya hal tersebut adalah karena pemerintah tidak mengedepankan kepentingan rakyat untuk meningkatkan infrastruktur dari segi kebutuhan primer, skunder serta pemerataan pembangunan.

Apabila fungsi atau manfaat pajak itu hilang maka mereka akan berhenti bekerja karena semakin besar pembebanan maka akan semakin besar efek terhadap usaha mereka dalam memproduksi. Akhirnya, jika rakyat enggan menghasilkan dan bekerja, maka pasar akan mati dan kondisi rakyat akan semakin memburuk serta penerimaan pajak juga akan menurun. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menekankan agar fungsi, manfaat serta mekanisme dari pajak itu dapat direalisasikan dengan tepat dan benar.<sup>8</sup>.

Pendapatan pajak yang dipungut dari masyarakat seharusnya dikembalikan lagi kemasyarakat dalam bentuk keadilan dan kesejahteraan serta kemakmuran maka pendistribusian harus dengan tepat tanpa ada yang keliru. Baik kebijakan pemerintah dalam memungut pelaksanaan pajak serta kebijakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah pada publik.

Menurut Ibnu Khaldun dalam buku *Muqaddimah* peran Negara juga perlu menciptakan sebuah keadilan dalam kehidupan bernegara. Ibnu Khaldun

---

<sup>7</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut : Daar Fikr). h. 279

<sup>8</sup> Merza Gamal, *Pengkaji Sosial Ekonomi Islami*, <http://www.mail-archive.com@yahoo.com>

berkomentar bahwa Negara tidak akan berkembang tanpa menegakan keadilan dan juga menekankan penindasan yang akan menghambat pembangunan dan pembangunan yang terhambat akan mengakibatkan kehancuran Negara..<sup>9</sup>

Oleh karena itu sangat menarik bagi penulis untuk mengetahui secara mendalam bagaimana dasar pemikiran pajak Ibnu Khaldun serta fungsi, mekanisme dan manfaat pajak Ibnu Khaldun

Berdasarkan uraian diatas, penulis tergugah untuk meneliti secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG FUNGSI DAN MEKANISME PAJAK ”**

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah berkenaan dengan bagaimana dasar pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak, fungsi serta mekanisme pajak menurut Ibnu Khaldun , serta manfaat pemikiran pajak Ibnu Khaldun

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak
2. Apasaja fungsi dan mekanisme pajak menurut Ibnu Khaldun
3. Apasaja manfaat pemikiran pajak Ibnu Khaldun

---

<sup>9</sup> Ibnu Khaldun, *Opcit.* h. 288.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak
2. Untuk mengetahui bagaimana fungsi serta mekanisme pajak menurut Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*nya
3. Untuk mengetahui Apasaja manfaat pemikiran pajak Ibnu Khaldun

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai perbandingan dan untuk memperluas ruang lingkup khazanah intelektual dikalangan dunia kampus khususnya dan umat Islam pada umumnya tentang pajak.
2. Sebagai kontribusi keilmuan untuk menambah pembendaharaan tentang Sebagai karya tulis dalam memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Sumber Data**

Penelitian ini berbentuk penelitian ke perpustakaan (*library reseach*), yaitu dengan mengadakan penelaahan terhadap karya-karya yang dikarang oleh Ibnu Khaldun yang ada di berbagai pustaka. Oleh karena itu sumber data yang diperoleh berasal dari literatur-literatur yang ada dipustaka yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang dimaksud. Sumber data tersebut dikelompokan dalam dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer yaitu karya-karya Ibnu Khaldun

terutama yang berkaitan erat dengan masalah perpajakan yaitu *Muqoddimah*nya, dan juga karya lainnya. Sementara sumber data skunder yaitu karya-karya para tokoh lain terutama yang membahas masalah perpajakan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data ialah dengan cara mengadakan pengkajian dan penelaahan terhadap literatur-literatur yang ada di pustaka terutama mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan. Literatur ini dibaca dan sekaligus dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah dipahami, selanjutnya baru dilakukan dengan penganalisaan

## 3. Teknik Analisa Data

Setelah tersusun dalam bentuk kerangka yang lengkap secara keseluruhan baru dianalisa sesuai dengan kemampuan penulis. Dalam melakukan penganalisaan perlu digunakan metode yang dikenal dengan metode deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari pemikiran Ibnu Khaldun lalu dijelaskan dengan memusatkan pada pemecahan masalah yang ada dan dianalisa dengan mendalam. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam penulisan skripsi.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dari penulisan skripsi ini, penulis akan membagi lima bab sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II : BIOGRAFI IBNU KHALDUN**

Dalam bab ini yang memuat tentang kelahiran Ibnu Khaldun, perjalanan karir Ibnu Khaldun, karya-karya Ibnu Khaldun, sekaligus tentang pemikiran sosial ekonomi.

## **BAB III : TINJAUAN PAJAK SECARA UMUM**

Pada bab ini, pembahasan yang membicarakan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, mekanisme pemungutan pajak, pajak dalam islam.

## **BAB IV: PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG PAJAK**

Dalam bab ini, memuat tentang bagaimana dasar pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak, bagaimana fungsi serta mekanisme pajak menurut Ibnu Khaldun, serta manfaat pemikiran pajak Ibnu Khaldun.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

## **RENCANA OUTLINE**

### **PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG PAJAK**

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penulisan
- F. Sistematika Penulisan

#### **BAB II            BIOGRAFI IBNU KHALDUN**

- A. Kelahiran Ibnu Khaldun
- B. Perjalanan Karir Ibnu Khaldun
- C. Karya-karya Ibnu Khaldun
- D. Pemikiran tentang sosial ekonomi

#### **BAB III          TINJAUAN PAJAK SECARA UMUM**

- A. Pengertian pajak
- B. Fungsi pajak
- C. Syarat Pemungutan Pajak
- D. Mekanisme pemungutan pajak
- E. Sistem pajak dalam Islam



#### **BAB IV        PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG PAJAK**

- A. Bagaimana dasar pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak
- B. Bagaimana fungsi serta mekanisme pajak menurut Ibnu Khaldun
- C. Manfaat pemikiran pajak Ibnu Khaldun.
- D. Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pajak

#### **BAB V        PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## BAB II

### BIOGRAFI IBNU KHALDUN

#### A. Kelahiran Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada awal bulan Ramadhan 732 H (27 Mei 1332 M).<sup>1</sup> dan Ia Wafat pada tanggal 26 Ramadhan 808 H. (16 Maret 1406 M) tak lama setelah ditunjuk sebagai hakim. Dia dikebumikan dikawasan pemakaman orang sufi di Kairo<sup>2</sup>. Ia mempunyai nama lengkap Abdurrahman Abu Ziad Waliuddin Ibnu Khaldun. Abdurrahman adalah nama kecilnya dan Abu Zaid adalah nama panggilan keluarganya, sedangkan Waliuddin gelar yang diberikan kepadanya sewaktu Ia menjabat sebagai qodhi di Mesir. Selanjutnya Ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Khaldun.

Berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Keluarga Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan<sup>3</sup>.

Dalam kitabnya *At-Ta'rif*, Ibnu Khaldun menguraikan tentang dirinya dan garis keturunannya. Ia adalah Abdurrahman ibn Muhammad ibn

---

<sup>1</sup> Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan pola pemikiran Islam*, ( Jakarta : Penerbit Pustaka Firdaus, 1989), h. 15.

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 20

<sup>3</sup> H. Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, Persada, cetakan pertama, 2004). h. 356

Muhammad Ibn Hasan Ibn Jabir Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abdurrahman Ibnu Khaldun<sup>4</sup>

Kelahiran Ibnu Khaldun merupakan penghujung zaman pertengahan dan permulaan zaman *Renaissance* (kebangkitan) di Eropa. Ia hidup ketika dunia Islam berada pada masa kemunduran yang ditandai dengan kejatuhan kekhalifahan abbasiyah ke tangan pasukan Moghul pimpinan Timur Lenk.

Sedangkan di Afrika Utara yang bersama-sama Andalusia disebut Maghrib, masa tersebut pada akhir abad XII M atau awal abad XIII yang merupakan runtuhnya Dinasti al-Muwahhidun. Dimasa abad ke XIII M ini sebagai kota-kota pelabuhan jatuh ke tangan Raja Castilia termasuk kota Sevilla (1248 M). Banu Khaldun terpaksa hijrah ke Afrika Utara mengikuti jejak Banu Hafs dan menetap di kota Ceuta.

Di Ceuta, Banu Hafs setelah berjuang dengan gigih dapat menguasai sebagian besar wilayah negeri ini. Mereka mengangkat Abu Bakar yaitu kakek kedua Ibnu Khaldun untuk mengatur urusan negara mereka di Tunisia, serta mengangkat kakek pertama beliau Muhammad ibn Abu Bakar untuk mengurus urusan ijabah yakni permasalahan kantor urusan kenegaraan di Bijjayah (Bouqie)<sup>5</sup>.

Ibnu Khaldun yang dikenal cerdas dikalangan seusianya. Dalam usia muda ia telah menghafal al-Qur'an dan menguasai disiplin ilmu lain seperti, hadist, tafsir tajwid ushul fiqih, tauhid dan fiqih Mazhab Maliki. Ia juga

---

<sup>4</sup> Husein 'asiy, *Ibnu Khaldun Muakhkhoron*, (Birrut Libanon. 1991). h. 7

<sup>5</sup> Moch Abdullah Enan, *Ibnu Khaldun His Life and Work*, (Lahore : Kashmiri Bazar, 1946). h. 7

mempelajari dunia aqliyah (*rasional*) seperti nahwu, sharaf dan balaghah. Disamping itu juga ia mendalami ilmu-ilmu seperti politik, sejarah, ekonomi fisika geografi, matematika dan ekonomi. Dari sekian banyak disiplin ilmu yang dipelajari dan studinya, ia selalu memperoleh nilai yang sangat memuaskan dari para gurunya.

Pendidikan pertama ia peroleh dari orang tuanya sendiri. Disamping itu ia juga mempelajari bahasa arab dengan sasteranya, alqur'an dengan tafsirnya, hadist dengan ilmu mustholahnya, ilmu tauhid, fiqih, filsafat serta ilmu hitung. Ia memperoleh berbagai izajah dari sebagian besar guru-gurunya.<sup>6</sup>

Pada usia 18 tahun dan bertepatan dengan tahun 749 H Ibnu Khaldun berhenti belajar karena diakibatkan sebuah peristiwa penting yang melanda sebagian besar belahan dunia timur dan bagian barat meliputi, negara-negara Islam dari semarkand hingga Maghribi dan Itali, sebagian besar beberapa Negara Eropa dan Andalusia terjangkit suatu wabah penyakit pes. Dengan penyakit ini menyebabkan kedua orang tuanya meninggal dunia dan juga beberapa orang gurunya. Akibatnya penguasa bersama-sama dengan ulama yang masih mampu bertahan hidup untuk hijrah ke Maghribi jauh (Maroko) pada tahun 750 H.

Ibnu Khaldun merasakan betapa peristiwa wabah pes tersebut sebagai suatu hal yang luar biasa dan merupakan bencana besar dalam hidupnya. Ia namakan wabah penyakit tersebut dengan *tha'un jarif* yang Ibnu Khaldun gambarkan seakan-akan dunia ini telah menggulung tikarnya dan menyapu

---

<sup>6</sup> Husein 'asiy. *Op.cit* . h. 17

bersih segala sesuatu yang berada di atasnya. Ia tidak saja kehilangan orang tua tercintanya dan sebagian besar saudara-saudaranya akan tetapi juga para gurunya ikut meninggalkannya.<sup>7</sup>

## **B. Perjalanan dan Karir Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun hidup bermasyarakat sebelum berusia 20 tahun. Pada mulanya ia menjabat tukang stempel surat pada pemerintahan Abu Muhammad Ibnu Tafrakin. Tatkala Ibnu Tafrakin ini ditaklukan oleh Abu Yazid, penguasa konstantinopel, Ibnu Khaldun melarikan diri dan bekerja sama dengan Sultan Abu Inan di Tlemcen. Ibnu Khaldun digaji Oleh Abu Inan, sebagai sekretaris mengurus surat menyurat. Ibnu Khaldun mengaku menerima jabatan itu dengan setengah hati sebab dia menganggap sebagai kerja rendahan, dan tidak seorangpun leluhurnya melakukan pekerjaan serendah itu. Meskipun dia mengaku mendapat penghargaan tinggi dari sulatan, namun hasratnya menjadi orang besar dan disegani memaksanya untuk terjun ke dunia politik dan bekerja sama dengan pihak lain untuk menggulingkan Sulthan.

Dia membantu Amir Abu Abdullah Muhammad memperoleh kembali kekuasaannya, dengan syarat kalau usaha itu berhasil dia diangkat menjadi perdana menteri. Namun Abu Inan mengetahui persekongkolan itu dan segera memerintahkan politisi muda untuk menumpas. Ibnu Khaldun dimasukkan dalam penjara dan mendekam selama dua tahun (1357 M-1358 M), dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 19

selama itu berkali-kali dia memohon Sulthan membebaskannya. Menjelang kematiannya, Sulthan berjanji membebaskannya.

Keluar dari penjara Ibnu Khaldun mendukung Abu Salim yang pada tahun 1359 M menjadi penguasa Maroko dan mengangkat Ibnu Khaldun sebagai sekretaris Negara dan penasihatnya. Setelah Abu Salim meninggal, dan karena intrik-intrik pengadilan, Ibnu Khaldun memutuskan untuk meninggalkan Maroko. Pada tahun 1362 dia bergabung dengan pemerintahan Mohammad V dari Granada. Mengingat betapa besar bantuan Ibnu Khaldun kepadanya dan kepada perdana mentrinya Ibnu al-Khatib ketika mereka berada di Fez sebagai buronan, Mohammad merasa berhutang budi dengan cara memberikan pelayanan sangat baik kepada Ibnu Khaldun.

Dia mengutus Ibnu Khaldun sebagai duta besar menemui raja Perdo si kejam dari Castila untuk menanda tangani perjanjian damai antara kedua Negara. Penguasa Kristen bukan hanya menghormati Ibnu Khaldun tetapi juga berusaha menggaetnya lewat tawaran membuka kembali perkebunan keluarga Khaldun di Selvia.<sup>8</sup>

Ibnu Khaldun menolak namun di Granada, Ibn al-Khatib tidak mengizinkan Ibnu Khaldun mengembangkan kekuasaannya di pengadilan. Waktu itu Ibnu Khaldun gembira ditawari Abdullah Muhammad Al-Hafsi (yang merebut tahta Bijayah) untuk menjadi perdana menterinya. Dia menerima tawaran itu tanpa ragu-ragu, dan dengannya memiliki kekuasaan mutlak, mengatur semua urusan dengan serius, meredakan tikaian dengan

---

<sup>8</sup> Fuad Baali dan Ali Wardi, *Op.cit.* h. 15-16

cekatan dan berkunjung ke daerah-daerah untuk mengumpulkan pajak dengan mengandalkan kecerdasan dan pengaruhnya. Disamping itu dia menjadi dosen hukum di Bijayah.

Pemerintah Abu Muhammad berakhir setelah ia ditaklukkan dan dibunuh oleh sepupunya Abul Abbas. Ibnu Khaldun datang menyambut kemenangan Abbas itu dan kepadanya diserahkan kota Bijayah. Ibnu Khaldun bertahan kepada kedudukannya, hingga kemudian merasa pemerintah tidak memercayainya karena itu dia memutuskan berangkat ke Basra.

Disana dia dipanggil Amir Abu Hamu di Tlemcen untuk diangkat menjadi perdana menteri. Ibnu Khaldun menolak tawaran ini dan mengusulkan kakaknya Yahya sebagai penggantinya. Namun demikian, Ibnu Khaldun membantunya mengumpulkan beberapa suku untuk memihak Abu Hamu melawan Abul Abbas.

Setelah mengabdikan kepada pemerintah yang satu ke yang lain, Ibnu Khaldun merasa lelah dalam petualangan politiknya. Ketika Abu Hamu memintanya agar mencari dukungan dari para suku lebih banyak, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan politik dengan meminta kepada Banu Arif. Itulah masa dia menulis bukunya *Muqaddimah*. Sebagaimana diungkapkannya. Sebagaimana dikutip oleh Fuad Baali dan Ali Wardi :

*“Begitu saya meninggalkan urusan rakyat, untuk hidup di pengasingan saya merasa cocok dengan awlad Arif; dan mereka menyambut baik kedatangan saya dengan memberi kehormatan. Saya tinggal bersama mereka dan mereka menjemput keluarga dan anak saya di Tilimisan. Mereka menjanjikan pada saat yang sama untuk mewakili Sultan. Inilah kesempatan yang sangat baik bagi saya untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan*

*kepada saya dan kenyataannya mereka dapat membujuk Sultan untuk menerima alasan saya. Kemudian saya menetap sekeluarga di Qal'at Ibnu Salamah, sebuah pesanggarahan di daerah Banu Tujin yang diperoleh dari Sultan dengan Duwawidah di daerah kekuasaan Feodal. Saya menetap disana selama 4 tahun, sama sekali bebas dari kesibukan dan gangguan urusan rakyat dan disanalah saya mulai menulis karya saya (sejarah umum).*

*Dalam pengasingan Ibnu Khaldun menulis suatu karya asli yang dirancang dan disusun dari hasil penelitian yang serius. Di Qal'at Ibnu Salamah, saya menempati sebuah kamar pribadi yang luas dan menyenangkan yang telah dibangun oleh Abu Bakar Ibnu Arif. Selama saya tinggal bersama dirumah tersebut, saya sama sekali melupakan kerajaan Maghrib dan Tilimisan dan tidak memikirkan hal lain kecuali pekerjaan yang sedang saya tekuni.*

Setelah menulis *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun merasa jenuh di pengasingan, karena itu diniatkan pergi ke Tunisia., daerah kelahirannya. Pada saat itu Abu Abbas masih menjadi Sulthan di sana. Untuk mendekati Abu Abbas, Ibnu Khaldun mengirim surat yang mengharukannya, dengan menjelaskan mengapa beberapa puluh tahun belakangan ini dia mendukung kelompok-kelompok oposan terhadap pemerintahnya. Ibnu Khaldun memohon maaf dan meminta izin agar dapat kembali ke Tunisia untuk mengadakan beberapa penelitian. Sultan mengizinkannya.

Kebahagiaan Ibnu Khaldun untuk dapat menikmati hidup ditanah kelahirannya ternyata tidak berlangsung lama. Beberapa temannya menunjukkan sikap bermusuhan terhadapnya. Disamping itu, sulthan menyuruh para sarjana membantunya menumpas beberapa pemberontakan. Ibnu Khaldun tidak menyukai tugas yang berbahaya ini, karena itu dia putusan pergi naik haji. Dia meninggalkan Tunisia pada tahun 1382 menuju



Alexandria (Mesir) untuk melanjutkan perjalanannya ke Mekkah, dia harus pergi ke Kairo yang sebelumnya telah memberi kesan baik kepadanya.<sup>9</sup>

Di Kairo, Ibnu Khaldun meninggalkan karirnya semula dan mengambil jalur pendidikan. Para pelajar berkumpul di “Halaqah Masjid” tempatnya mengajar. Mereka menyukai penjelasannya yang mengesankan tentang fenomena sosial. Kemudian dengan ragu-ragu dia terima pengangkatan sebagai hakim, tetapi kebiasaan lamanya memanfaatkan kekuatan rakyat untuk mencapai tujuan pribadinya ia tinggalkan.

Ibnu Khaldun memulai pekerjaannya sebagai hakim dengan jujur dan tulus. Kejujuran yang dipertunjukkannya dalam mengambil keputusan ternyata membuatnya banyak dimusuhi. Ibnu Khaldun meletakkan jabatan itu setelah mendengar kabar yang menyedihkan bahwa keluarganya, yang sedang berangkat dari Tunisia hendak tinggal bersamanya, mengalami kecelakaan ketika penumpang kapal dekat Alexandria pada tahun 1384. Ibnu Khaldun kembali mengajar lagi dan diangkat segai guru besar hukum di Universitas Zahiriyah. Baru pada tahun 1387 M dia dapat menunaikan haji. Setelah menunaikan ibadah haji dia ditunjuk menjadi dosen Universitas Baybars.<sup>10</sup>

Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tanggal 26 Ramadhan 808 H (16 Maret 1406 M) dalam usia 74 tahun menurut hitungan tahun masehi atau 76 tahun menurut perhitungan tahun hijriah. Tak lama setelah ditunjuk keenam

---

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 17-18

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 19

kalinya sebagai hakim. Dia dikebumikan di kawasan pemakaman orang sufi di Kairo.<sup>11</sup>

### C. Kaya-Karya Ibnu Khaldun

Setelah membicarakan perjalanan hidup dan perjalanan karir Ibnu Khaldun, dalam hal ini penulis akan menguraikan tentang karya-karyanya untuk memperjelas dan melengkapi kajian terhadap Ibnu Khaldun beserta karya-karya lain yang telah terkenal seperti, *al-Ibar*, *Muqoddimah* dan *at-Ta'rif*, namun dapat diyakini bahwa Ibnu Khaldun tentunya masih banyak lagi berbagai karya-karya yang tidak sepopuler diatas yang belum ditemukan maupun yang belum diterbitkan.

Hal tersebut dikemukakan berdsarkan asumsi bahwa Ibnu Khaldun banyak bergerag dibidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Untuk itu setidaknya Ibnu Khaldun mempersiapkan naskah-naskah dan sejenisnya, guna kepentingan perkuliahan diberbagai perguruan tinggi.

Penjelasan tentang karya-karya Ibnu Khaldun yang banyak dibahas para ahli sampai saat sekarang ini adalah :

#### 1. Kitab *al-Ibar*

Kitab *al-Ibar* merupakan kitab yang pertama yang menjelaskan teori-teori Ibnu Khaldun tentang permasalahan-permasalahan sejarah dan dan masalah-masalah dibidang ilmu sosiologi (ilmu kemasyarakatan), dan kitab ini berisi beberapa volume yang hanya sebagai pengantar atau pengenalan terhadap perjalanan hidupnya secara global. Ibnu Khaldun menyebutkan karya

---

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 20

sejarahnya ini dengan “*Kitab al-Ibar wa Diwan al-Mubtada wal Khabar fi Ayyam al-Arabi wal ‘Ajami wal Barbar wa man Asrahum min Dzawi al-Sulthan al-Akhbar*”<sup>12</sup>. Kita menerjemahkan kitab ini kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut : kitab i’tibar dan catatan sejarah terdahulu dan kemudian, tentang peristiwa bangsa arab, asing dan Barbar, serta penguasa-penguasa besar yang semasa dengan mereka.

Ibnu Khaldun menulis kitab ini kira-kira 45 tahun dari umurnya ketika berada dirumah Qal’ah bin Salamah daerah Aljazirah<sup>13</sup>.

## 2. *Muqaddimah*

Kitab *Muqaddimah* yang selama ini kita ketahui hanyalah sebagai pendahuluan (*Muqaddimah*) dari buku utamanya yakni kitab *Al-‘Ibar* namun demikian sekarang dipisahkan menjadi bagian lain dari kitab *al-‘Ibar* tersebut, hingga akhirnya menjadi karya yang berdiri sendiri sebagaimana yang kita kenal dengan nama *Muqaddimah Ibnu Khaldun*.

Buku *Muqaddimah* yang ada sekarang ini merupakan salah satu karya yang monumental yang dianggap bernilai tinggi karena mampu menelaah permasalahan-permasalahan kontemporer atau peristiwa yang aktual dengan cakupan universal tentang berbagai aspek kehidupan dan disiplin ilmu pengetahuan. Hal tersebut membuat buah karya Ibnu Khaldun ini menjadi hal

---

<sup>12</sup> M.A. Enan, *Op.cit.* h. 134

<sup>13</sup> Husein ‘asiy. *Op.cit* h. 122

yang menarik untuk membicarakan hingga kini sebagaimana hasil karya pemikiran-pemikiran Islam lainnya sepanjang masa.<sup>14</sup>

Husain dan Slane sekalipun menjelaskan tentang kekaburan dan kekacauan dalam karya Ibnu Khaldun tidak dapat diterima begitu saja. Berdasarkan kenyataan yang ada, Ibnu Khaldun jauh dari kekaburan dan kekacauan. Karyanya sangat jelas dibanding para penulis lain yang hidup pada masa dan kebudayaannya.

Ibnu Khaldun memberikan alasan sebab-sebab yang mendorong dirinya untuk membahas secara keseluruhan isi kitab al-Ibar, dengan menjelaskan pembagian tema, dan objek utama dari masing-masing pembahasan secara sistematis menurut zamannya. Ibnu Khaldun membagi pokok pembahasan kepada enam bab, yang dalam bahasa arab dinamakan fasal. Bab-bab tersebut sebagai berikut :

Bab pertama, membahas peradaban umat manusia secara umum.

Bab kedua, membahas tentang peradaban masyarakat pengembara, bangsa dan kabilah-kabilah liar, serta kehidupan mereka.

Bab ketiga, membahas tentang Negara, kerajaan , khilafah, pangkat, pemerintahan dan hal-hal yang berhubungan dengannya.

Bab keempat, membahas tentang wilayah-wilayah pedesaan dan perkotaan, kondisi yang ada, berbagai peristiwa yang terjadi dan hal-hal utama yang harus diperhatikan.

---

<sup>14</sup> M.A. Enan, *Op.cit.* h. 187

Bab kelima, membahas tentang hal mata pencaharian, ekonomi dan perdagangan. Dalam berbagai pasal juga diuraikan tentang beragam ilmu pengetahuan seperti pertanian, pembangunan dan segala ihwal yang terjadi sehubungan dengannya.

Bab keenam, membahas tentang berbagai jenis ilmu pengetahuan, pengajaran dan metode-metode yang digunakan serta berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah tersebut.<sup>15</sup>

### 3. *At-Ta'rif*

*At-Ta'rif* merupakan buku yang berisi otobiografi Ibnu Khaldun. Ia menyelesaikan penulisan buku ini pada awal tahun 797 H. semula buku tersebut berjudul *at-Ta'rif bi Ibnu Khaldun Mu'allif Hadza al-Kitab*. Kemudian Ibnu Khaldun merevisi buku ini dengan melengkapinya dengan hal-hal yang baru dan dengan metode-metode yang baru juga hingga akhir-akhir hidup Ibnu Khaldun yang berselang beberapa bulan sebelum ia wafat tahun 808 H, ia menambahkan beberapa sejarah negara-negara dengan secara terpisah dari permulaan sampai akhir, hingga buku tersebut beberapa bab. Dan kemudian diberi judul : *At -Ta'rif bi Ibnu Khaldun Mu'allif Hadza al-Kitab wa Rihlatahu Gharban wa Syarqan*<sup>16</sup>.

## D. Sekilas tentang pemikiran Sosial Ekonomi

Pemikiran sosial ekonomi Ibnu Khaldun sangat berkaitan erat dengan perkembangan politik yang ada dan stabilitas negara dalam merealisasikan kebijakan-kebijakannya dalam menata perekonomian masyarakatnya.

---

<sup>15</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Birrut: Daarul Fikr, t.t) Bab I h. 35-36

<sup>16</sup> <sup>16</sup> M.A. Enan, *Op.cit.* h. 141-145

Fenomena sosial dengan fenomena ekonomi serta fenomena politik memainkan peran penting dalam melanjutkan misi dari sebuah pemerintahan.

Dalam *Muqaddimah* diungkapkan tentang pentingnya aspek ekonomi dalam kehidupan manusia yakni : ketahuilah perbedaan berbagai generasi timbul karena perbedaan dalam kehidupan mereka. Mereka hidup bermasyarakat tidak lain hanyalah saling membantu didalam memperoleh keperluan hidup. Yang mula-mula mereka lakukan adalah hal yang primer baru yang skunder dan ketika itu telah terpenuhi baru keperluan yang bersifat melengkapi itu dicukupi.<sup>17</sup>

Perbedaan yang sangat substansial diungkapkan oleh Ibnu Khaldun dalam studinya membangun sebuah kebudayaan adalah adanya perbedaan antara budaya sederhana “*umran badawi*” dengan budaya tata sopan “*umran hadhara*” dan budaya kemewahan yang berpijak pada kekuatan harta dan kemewahan. Kehidupan ekonomi masyarakat akan berjalan dengan baik ketika masyarakat memiliki nilai solidaritas sosial yang tinggi tanpa membedakan SARA (suku, agama, ras dan adai istiadat) diantara sesama mereka sehingga tidak terjadi konflik sosial di masyarakat.<sup>18</sup>

Ibnu Khaldun mengambil suatu pandangan ekonomi tentang pajak dan pengeluaran publik :

Faktor yang paling kuat memberikan kontribusi kepada penduduk dan peradaban adalah mengurangi sekecil mungkin kuantitas pajak terhadap rakyat

---

<sup>17</sup> Ibnu Khaldun, *Op cit.* h. 121

<sup>18</sup> Muhsin Mahdi, *Ibnu Khaldun's Philosophy of History A Study in the philosopic Foundation of the Scifnce of culture*, (London : George Allen and Unwim Ltd, t.t), h. 65-71

sampai batas layak. Hal ini akan memberikan dorongan kepada rakyat sehingga mereka merasakan kepercayaan dengan menyadari manfaat dari peradaban. Pajak yang rendah mengarah kepada peningkatan kemakmuran dan menghasilkan pendapatan total yang lebih besar.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Karnaen A. Perwataatmadja. *Jejak Rekam Ekonomi Islam*. (Jakarta : Cet. Pertama), h. 168

### **BAB III**

#### **TINJAUAN PAJAK SECARA UMUM**

Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa, yaitu “*ajeg*”, yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. *Pa-ajeg* berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa.<sup>1</sup>

#### **A. Pengertian pajak secara umum**

Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan para ahli. Prof. Dr. P. J. A. Andriani merumuskan :

Pajak adalah iuran kepada Negara(yang dapat dipaksakan) bagi yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat perestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menjalankan roda pemerintahan.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mendefinisikan sebagai berikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negaraberdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- 1 Iuran dari rakyat kepada negara.

---

<sup>1</sup> Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*, (Jakarta: Kencana, 2006). h. 21.

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 22



Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- 2 Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3 Tanpa jasa timbal balik dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk
- 4 Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>3</sup>

## **B. Fungsi Pajak**

Pengertian fungsi pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal. Makna fungsi pajak adalah kegunaan pokok, mamfaat pokok pajak. Ada dua fungsi pajak yaitu :

- 1 Fungsi *budgetair* yaitu berfungsi mengisi kas Negara atau anggaran pendapatan Negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan.
- 2 Fungsi *regularend* yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>4</sup>

## **C. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1 Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

---

<sup>3</sup> Mardiamso, *Perpajakan*, (Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2008). h. 1

<sup>4</sup> Sony Devano *Op.cit.* h. 25

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang(Syarat Yuridis)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)  
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>5</sup>

#### **D. Mekanisme Pemungutan Pajak**

1. Pemungutan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan tiga stesel :

---

<sup>5</sup> Mardiamso, *Op.cit.* h. 2

a. *Stelsel* nyata (riël stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. *Stelsel* nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir priode(setelah penghasilan riil diketahui).

b. *Stelsel* anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel* campuran

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan,

maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## 2. Sistem Pemungutan Pajak

### a. *Offical Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak ayang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.<sup>6</sup>

## E. Pajak Dalam Islam

### 1. Pengertian Pajak Menurut Syari'at

Ada beberapa pengertian tentang pajak dalam Islam, yaitu *Dharibah*, *Fay'i*, *Jizyah*, *Kharaj*, dan *ushr* (bea cukai)

Secara *etimologi*, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata *dhoroba*, *yadhribu*, *dhorban* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan.

*Dharaba* adalah bentuk kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah*, yang berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal). Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 7-8

<sup>7</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.

Pajak juga bisa diartikan dengan *fay'i* yang berarti mengembalikan. Dalam terminologi hukum *fay'i* menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. Istilah *fay'i* digunakan untuk seluruh harta yang diperoleh dari musuh, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak seperti tanah. Jadi ada beberapa jenis pendapatan yang termasuk kedalam *fay'i*, yaitu *kharaj*, *jizyah* dan *ushr* (bea cukai). Ibnu Taimiyah menjelaskan seluruh sumber pendapatan diluar Ghanimah dan sedekah adalah *fay'i*.<sup>8</sup>

*Jizyah* berasal dari kata *jaza'* yang berarti kompensasi. Dalam terminologi keuangan Islam, istilah tersebut digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non-Muslim yang ada di NegaraIslam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Disamping itu mereka diberi keamanan sosial. Jadi istilah *Jizyah* tersebut diambil sebagai akibat kekufuran mereka, oleh karena itu *Jizyah* tersebut tidak gugur, kecuali apabila mereka memeluk agama Islam. Mannan mengatakan :

“*Jizyah* dikenakan kepada kalangan non-Muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh NegaraIslam guna melindungi kehidupannya, misalnya harta benda, ibadah keagamaan dan untuk pembebasan dari dinas militer. Dan golongan non-Muslim yang kehidupan dan harta bendanyaterjamin seperti kawan kafir *Dhimmi*”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 118

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 121

*Kharaj* berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, *kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada NegaraIslam. *Kharaj* adalah hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum Muslimdari orang-orang musyrik yang tergolong ke dalam kelompok pendapatan Negarayang diwajibkan setelah menunggu satu tahun. Istilah *kharaj* terdapat dalam kitabnya Abu Yusup yang berjudul *Al Kharaj*.

*Ushr* (bea cukai) dikalangan ahli fiqhi memiliki dua pendapat, *pertama*, 10% dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seorang Muslim. *Kedua*, 10% diambil dari pedagang-pedangang kafir yang memasuki wilayah Islam karena membawa barang dagangan. Istilah ini terdapat ketika masa ke Khalifahan Umar yang memutuskan agar pajak dipungut di pos-pos perbatasan.<sup>10</sup>

## **2. Defenisi Pajak Menurut Syari'at**

Pajak adalah membayar tunai, artinya seorang mukallaf membayarnya dengan uang tunai tidak berupa barang. Pada zaman dahulu pajak dipungut berupa barang karena sistem ekonomi pada masa itu memang demikian.<sup>11</sup>

Ada tiga ulama yang memberikan defenisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh az-Zakah*, Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> *Ibid.* h.130

<sup>11</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprenship Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 2003). h. 1

1. Yusuf Qardhawi berpendapat. Sebagaimana dikutip oleh Gusfahmi :  
Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.
2. Gazi Inayah berpendapat. Sebagaimana dikutip oleh Gusfahmi :  
Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.
3. Abdul Qadim Zallum berpendapat. Sebagaimana dikutip oleh Gusfahmi  
Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt, kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang harta.

Dari beberapa definisi diatas, Abdul Qadim Zallum berpendapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syari'at yaitu :

- 1 Diwajibkan oleh Allah Swt



- 2 Objeknya adalah harta (*al-Mal*).
- 3 Subjeknya kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*), tidak termasuk non-Muslim
- 4 Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja.
- 5 Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri

Kelima unsur tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan Negaramenurut sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur :

1. Harus adanya nas (Alquran dan al-Hadist) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non-Muslim
3. Sistem pemungutan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Dengan defenisi diatas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat, (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan / kekurangan Baitul Mal, dapat dihapus jika keadaan Baitul Mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai

bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.<sup>12</sup>

### 3 Karakteristik Pajak Menurut Syari'ah

Beberapa ketentuan tentang pajak menurut syari'at Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu :

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya).
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.

---

<sup>12</sup> Gusfahmi. *Op.cit* . h. 31-33

- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang di konsumsi.
- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan<sup>13</sup>.

#### **4. Ulama yang Berpendapat Bahwa Pajak Itu Boleh**

Sejumlah fuqaha dan ekonomi Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain :

- 1 Abu yusuf, dalam kitabnya *al-Kharaj*, menyebutkan bahwa. Sebagaimana dikutip oleh Gusfahmi :

Semua khulafa ar-rasyidin, tentang Umar, Ali dan Umar Ibnu Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 35

kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.

- 2 Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*, dengan cara yang sangat bagus merefleksikan arus pemikiran para sarjana Muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat dari Tharir Ibnu Husain kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur disalah satu provinsi :

*“Oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapa pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaannya, dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya”.*

- 3 Marghinani dalam kitabnya *al-Hidayah* berpendapat bahwa. Sebagaimana dikutip oleh Gusfahmi :

*“Jika sumber-sumber Negara tidak mencukupi, Negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika mamfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya”.*

- 4 M. Umar Chapra, dalam *Islam and The Economic Challnge* menyatakan:

*“Hak Negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin, pada hal Negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitasi secara efektif”.*

- 5 Ibnu Taimiyah, dalam *Majmuatul Fatwa*, mengatakan :

Larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.

## 5. Alasan Ulama Tentang Kebolehan Pajak

- a. Maliki berpendapat . Sebagaimana dikutip oleh Gusfahmi :

*“Karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas Negaratidak mencukupi, maka pajak itu menjadi “wajib”. Walaupun demikian, Syara’ mengharamkan Negaramenguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika Negaramengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu rampasan, sedang merampas hukumnya haram”.*

- b. Umer Chapra berpendapat. Sebagaimana dikutip oleh Gusfahmi :

*“Sungguh tidak realistis bila sumber perpajakan (pendapatan) Negara-NegaraMuslim saat ini harus terbatas hanya pada lahan pajak yang telah dibahas oleh para fuqaha. Situasi telah berubah dan mereka perlu melengkapi sistem pajak (baru) dengan menyertakan realitas perubahan, terutama kebutuhan massal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah Negaraberkembang dan perekonomian modren yang efisien serta komitmen untuk merealisasikan maqashid dalam konteks hari ini. Sambil melengkapi sistem pajak, kita perlu memikirkan bahwa sistem tersebut tidak saja harus adil, tetapi harus juga menghasilkan, tanpa berdapak buruk pada dorongan untuk bekerja, tabungan dan investasi serta penerimaan yang memadai sehingga memungkinkan NegaraIslam melaksanakan tanggung jawabnya secara kolektif”.*<sup>14</sup>

## 6. Persamaan dan Perbedaan Zakat dengan Pajak

Dilihat dari segi Agama Islam, antara Zakat dan Pajak ada mempunyai persamaan dan perbedaan, dibawah ini beberapa ulama mengemukakan tentang persamaan dan perbedaannya antara lain :

---

<sup>14</sup> Ibid., h.187

**A. Gazi Inayah di dalam buku “Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak”**

Arti pajak sebenarnya adalah kebalikan dari arti zakat, pajak dapat berarti berkurang, beban, kehinaan, rendah dan pengurangan, sesuai dengan firman Allah (at-Taubah ayat : 29 )

Arti zakat sebenarnya, yaitu kewajiban syari’at dan beban ukhrawi. Zakat juga ibadah maliyah yang murni ikhlas karena Allah, yang dikerjakan oleh orang Islam sebagaimana ibadah dan kewajiban lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda : “Islam didirikan atas lima perkara, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa ramadhan dan haji bagi yang mampu”.

Perbedaan arti pajak dengan zakat juga dapat dilihat dari kata asalnya. Zakat berasal dari kata kerja zaka yang berarti ketenangan jiwa, sedangkan pajak dalam bahasa arab berasal dari kata *dharaba* yang berarti memberatkan manusia karena disampaikan sebagai hukuman, beban berat dan pengurangan, sesuai dengan firman Allah (al-Baqarah : 61)<sup>15</sup>

**B. Yusuf Qardawi di dalam buku “Hukum Zakat”**

**1. Tentang Persamaannya**

- a. Ada unsur paksaan dan kewajiban untuk mendapatkan pajak dan demikian juga halnya mengenai zakat, bila seorang Muslim terlambat membayar zakat, karena Iman dan Islamnya belum kuat, pemerintah

---

<sup>15</sup> Gazi Inayah, *Op.cit.* h. 24

Islam dapat memaksanya dan bahkan memerangi mereka yang enggan membayarnya.

- b. Pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (Negara), di pusat atau daerah. Demikian juga halnya dengan zakat. Sebab pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerinyah (Amil Zakat)
- c. Para wajib pajak tidak mendapat imbalan dari pemerintah, begitu juga zakat, tidak mendapat imbalan secara langsung.
- d. Adanya sanksi, dimana sanksi tidak membayar zakat dalam bentuk dosa, sedangkan sanksi tidak membayar pajak dalam bentuk denda, pencabutan usaha dan sebagainya.<sup>16</sup>

## 2. Tentang Perbedaannya

1) Zakat mengandung arti suci, tumbuh dan berkah. Orang yang mengeluarkan zakat, jiwanya bersih dari sifat kikir, tamak, hartanya tidak kotor lagi, karena hak orang lain telah disisihkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan pajak adalah dharibah artinya hutang yang wajib dibayar, sehingga kesan pajak adalah beban berat yang dipaksakan walaupun hasil pajak itu juga dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan Negara.

2) Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada ummat sebagai tanda bersyukur kepada Alla, dan mendekatkan diri kepada-Nya. Sedangkan pajak adalah kewajiban atas muslim atau non-Muslim yang tidak dikaitkan dengan ibadah.

---

<sup>16</sup> Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Suska Press : 2008 ). h. 115

- 3) Zakat ketentuannya dari Allah dan Rasul-Nya, yaitu penentuan nisbahnya dan penyalurannya. Sedangkan pajak, ketentuannya sangat bergantung kepada kebijaksanaan penguasa (pemerintah).<sup>17</sup>
- 4) Zakat adalah kewajiban terhadap Agama, sedangkan pajak adalah suatu kewajiban terhadap Negara.
- 5) Zakat hanya boleh digunakan untuk delapan pos yang sudah ditentukan dalam surat al-Taubah ayat 60, sedangkan pajak digunakan untuk pos-pos yang sangat luas.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> M.Ali. Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransidan Lembaga Keuangan*.(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 65-66

<sup>18</sup> Muh. Said, *Op. cit.* h. 117



## BAB IV

### PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG FUNGSI DAN MEKANISME PAJAK

#### A. Dasar Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pajak

##### 1. Pengertian Pajak Menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun tidak memberikan pengertian pajak secara eksplisit dalam kitab *Muqaddimah*-nya. Pajak menurut istilah Ibnu Khaldun adalah *al-Jibayah* dengan pemahaman yaitu suatu kewajiban (beban) yang telah ditetapkan terhadap individu-individu (wajib pajak) yang harus disetorkan kepada Negara dengan ketentuan-ketentuan tanpa mendapatkan imbalan dari Negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh Negara.<sup>1</sup>

Pajak mempunyai ruang lingkup dan jangkauan yang sangat luas baik sumber maupun pemanfaatannya. Wajib pajak berlaku terhadap semua anggota masyarakat baik yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam. Yang sedikit kekayaan atau penghasilannya, maka sedikit pajaknya, dan yang banyak kekayaan atau penghasilannya sudah barang tentu banyak pula beban pajaknya.

---

<sup>1</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Birrut: Daarul Fikr, t.t), Bab III. h. 279

## 2. Landasan Pemikiran Ibnu Khaldun

Pembangunan Negara membutuhkan kepemimpinan politik maupun ekonomi untuk pelaksanaan yang tepat guna agar pembangunan tersebut dapat terealisasi dengan benar. Landasan pemikiran Ibnu Khaldun adalah mempunyai pola empirisme positivisme karena berisi kajian tentang sejarah, politik sosiologi dan ekonomi serta dalam mengungkapkan sebuah teori Ibnu Khaldun melihat keadaan yang terjadi disekelilingnya serta dengan pengalaman dari perjalanan hidupnya. Pola pemikiran seperti ini pula tidak jarang orang menilai seluruh tiori – tiorinya sepenuhnya bersifat materialistis temporalitis dan relativistis yang berbasis pada paham materialisme. Bahkan ada menyebutnya sebagai machiavelli versi Islam dalam hal pemikiran filsafat politik dan sejarah.<sup>2</sup>

Selanjutnya Ibnu Khaldun menegaskan bahwa suatu Negara hanya dapat didirikan dan ditegakkan atas dasar bantuan solidaritas sosial masyarakat. Solidaritas masyarakat harus terdapat sebuah solidaritas sosial yang terbesar dan terpusat serta membawahi solidaritas sosial yang lebih kecil. Solidaritas ini berbentuk solidaritas keluarga, suku yang di khususkan untuk raja.

Bahwa Negara hanya dapat didirikan dan ditegakan dengan persatuan, kesatuan solidaritas sosial masyarakat yang kuat, dan bahwa disana harus mementingkan integrasi bangsa tanpa melihat perbedaan-perbedaan seperti

---

<sup>2</sup> Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan pola pemikiran Islam*, ( Jakarta : Penerbit Pustaka Firdaus, 1989). h. 40

suku, Agama, ras (SARA) dan lainnya yang dapat memecah belah persatuan kesatuan dan solidaritas rakyat. Karena itu penguasa, hidup berdampingan dengan rakyatnya yakni menghilangkan sikap kemewah-mewahan dalam kekuasaan.<sup>3</sup>

Ibnu Khaldun melihat bahwa terdapat hubungan antara Negara dengan solidaritas sosial yang begitu erat kaitannya, apabila suatu Negara ingin didirikan maka harus dengan bantuan atau solidaritas sosial masyarakat itu sendiri, oleh karenanya mustahil suatu Negara akan berdiri tanpa dengan solidaritas dari masyarakat itu. Artinya tanpa uang (pajak) atau bantuan dari masyarakat Negara tidak akan bisa menjalankan roda-roda pemerintahannya.

Ibnu Khaldun mengingatkan kepada penguasa bahwa kehancuran suatu Negara yang datang melalui uang (pajak), karena semakin besar atau berkembang Negara itu maka semakin meningkat pendapatan Negara tersebut, ketika uang (pajak) sudah banyak maka akan timbul sifat kemewah-mewahan sehingga hak-hak dari masyarakat itu sering kali diabaikan.

Lebih lanjut Ibnu Khaldun bahwa pada mulanya Negara itu Negara *Badawi* atau kuno. Ia memiliki kualitas kasih sayang pada rakyatnya, terencana dalam pembelanjannya dan menghormati harta orang lain dengan memberikan hak-hak kepada masyarakatnya. Ia juga menghindari pajak yang bisa memberati masyarakatnya sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan pajak yang di bebankan kepada mereka, dan juga memperlihatkan

---

<sup>3</sup> Ibnu Khaldun, *Op. cit.* h. 295

kelicikan dan kelihaian di dalam mengumpulkan uang (pajak) dan didalam akuntansi para pejabat. Waktu itu tidak ada kesempatan untuk boros dalam pembelanjaan sehingga Negara tidak membutuhkan uang (pajak) yang banyak.<sup>4</sup>

Dan yang paling penting adalah rintangan-rintangan tidak akan pernah berkesudahan untuk mencapai kedaulatan, oleh karena itu apabila suatu Negara telah berhasil mencapai kedaulatan itu maka, seharusnya para pejabat pemerintah berusaha menjauhkan diri dari kehidupan bermewah-mewah karena kehidupan bermewah-mewah bagi para pejabat pemerintah akan membawa kehancuran bagi Negara dan perlu diingatkan bahwa pemerintah itu digaji oleh rakyat oleh karena itu pemerintah harus mengabdikan kepada rakyatnya. Karenanya yang menentukan maju dan hancurnya kedaulatan Negara itu terletak pada pemerintahannya.<sup>5</sup>

## **B. Fungsi dan Mekanisme Pajak Menurut Ibnu Khaldun**

Sesungguhnya telah ditetapkan atas rakyat untuk membayar pajak dari penghasilan pekerjaan mereka meskipun manfaat yang mereka peroleh sedikit. Apabila masyarakat telah merasakan manfaat pajak yang mereka berikan kepada pemerintah mereka akan terdorong untuk membayar pajak yang telah ditentukan atas mereka, dan apabila mereka telah melihat akan fungsi pajak

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid.* h. 371

yang sesuai pada jalannya mereka akan menghitung kembali kekurangannya hingga pemerintah dapat memperlakukan pajak tersebut dengan benar.<sup>6</sup>

Selanjutnya terkadang masyarakat yang melihat bahwa apa yang mereka harapkan dari pajak yang telah diberikan kepada pemerintah atau fungsi pajak itu tidak sesuai pada ketentuan-ketentuannya maka mereka akan terdorong untuk bersifat tidak jujur dalam membayar pajak mereka.

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa penerimaan Negara melalui adanya pemungutan pajak merupakan hal yang sangat signifikan ketika pemungutan itu didasarkan atas tingkat kemampuan individu untuk membayar pajak. Oleh karena itu kadar kewajiban dan beban individu dalam pemungutan pajak yang rendah akan memberikan semangat untuk bekerja dan senang untuk meningkatkan usahanya. Usaha berkembang dan meningkat, sebab pajak yang rendah membawa kepuasan hati bagi rakyat. Apabila usaha meningkat, jumlah kewajiban dan pembebanan pajak akan meningkat juga. Artinya, pendapatan pajak yang merupakan jumlah total pembebanan individu bertambah juga.

Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa perekonomian yang makmur diawal sebuah pemerintahan dihasilkan melalui pajak, bagaimanapun juga menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dengan tarif yang lebih rendah yang dibebankan kepada rakyatnya, namun sedikit jumlahnya dan banyak pembebanannya pada setiap individu akan membawa dampak depresi

---

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 279

perekonomian diakhir pemerintahan artinya menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi kepada rakyatnya.<sup>7</sup>

Namun apabila Negara itu telah berkembang yang berdasarkan dari sebuah Negara yang berdasarkan agama menjadi Negara yang berdasarkan kekuasaan atau seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun berdasarkan hukum dominasi dan solidaritas (*'ala sunan at-taghallub wa al-ashabiyah*), maka sifat rural (luar desa) yang memiliki segala sifat kesederhanaan sudah pasti akan menghilang diganti dengan sifat urban (kota) yang lebih mewah dan canggih.

Kehidupan sederhana menuntut agar orang-orang hidup dengan tata cara hidup bertoleransi, memuliakan orang lain, rendah hati, menjauhkan diri dari harta benda orang lain dan tidak berupaya keras untuk memperoleh harta orang lain itu, demikian pula pajak yang ditarik dari padanya yang merupakan sumber harta kekayaan Negara.

Apabila proses ini terus berlanjut dan kehidupan Negara juga selalu berkembang dengan kemakmuran dan kemewahan yang selalu meningkat serta penguasa yang selalu silih berganti dari yang satu kepada yang lain, dan mereka itu bersipat bijak sana, maka hilanglah sikap hidup sederhana.

Kemajuan dan kemewahan itu dalam pandangan Ibnu Khaldun tidak selamanya mempunyai konotasi yang positif, akan tetapi juga mengandung

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

dampak negatif. Yang penting diantara dampak negatif ini adalah tingkat moralitas dan kejujuran yang menurun, kalau dahulunya orang biasanya tidak mau mengganggu harta benda orang lain, maka dalam khidupan kota yang mewah itu mengganggu harta benda orang lain telah menjadi praktek biasa. Oleh karena itu untuk menghilangkan dampak negatif dan menurunnya tingkat moralitas serta kejujuran perlu pejabat pemerintahan yang jujur, adil dan amanah yang akan mengatur perpajakan agar pembangunan dapat terealisasi dengan baik.

Menciptakan negara yang makmur atau masyarakat yang sejahtera sangat membutuhkan pajak untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang di cita-citakan sebuah negara. Ibnu khaldun menjelaskan ketika kebutuhan pemerintah meningkat maka perlu penambahan pada pajak untuk memenuhi kebutuhan bagi apa-apa yang dibutuhkan kepadanya oleh pendapatan usaha-usaha masyarakatnya, kemudian pengeluaran pajak juga akan bertambah sesuai dengan kebutuhannya.

Kemudian ketika penghasilan pajak bertambah maka semakin besar peluang masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera, karna hakekat dari fungsi pajak itu sendiri adalah untuk membantu masyarakat yang lemah yang membutuhkan yang sering disebut “*distribution of welfare*” (pemerataan kesejahteraan). Bagi pemerintah hal itu menjadi suatu “*social benefit*” (manfaat sosial).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 280-281

Tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang semakin tinggi akan memberikan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan pajak sehingga memungkinkan pemerintah mengeluarkan anggaran yang lebih untuk kesejahteraan. Hal ini menimbulkan perluasan didalam lapangan ekonomi dan meningkatkan pembangunan.

Tanggung jawab pembangunan ada pada pemerintah dan masyarakat. Kedua-duanya harus terlibat langsung dan memikul pembangunan tersebut. Dalam kaitan ini untuk memperlancar jalannya pembangunan perlu dikembangkan iklim investasi kepada rakyat dengan memberikan kepercayaan penuh kepada mereka agar pembangunan berjalan lancar. Partisipasi rakyat akan menjadi pengaruh yang sangat penting karena adanya partisipasi tersebut rakyat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan.

Secara garis besar fungsi dari pajak itu ada beberapa macam yang bisa penulis ungkapkan yaitu :

- 1 Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan Negara.

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara diperlukan biaya demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan. Pembangunan harus bisa berjalan apabila ditopang oleh biaya yang cukup. Roda pemerintahan dalam rangka mensejahterakan warga dan rakyatnya tidak mungkin berjalan apabila dimotori dengan dana pajak yang memadai. Pajak



merupakan penerimaan Negara untuk membiayai kebutuhan pembangunan agar kontribusi pajak menjadi jelas yakni memakmurkan rakyatnya.<sup>9</sup>

Lebih lanjut Ibnu Khaldun menjelaskan, pengaruh pembebanan pajak yang selalu meningkat yang melampaui batas yang tidak wajar menurut pendapatan yang diperoleh akan memberati rakyat dan akan menimbulkan kesengsaraan terhadap rakyatnya karena ketidak mampuan mereka untuk membayar pajaknya sehingga akhirnya pajak itu sudah beralih fungsi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi rakyatnya dan bisa juga menyengsarakan rakyatnya, sehingga ini juga bisa menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak dan berpengaruh kepada pembangunan.

Pembebanan pajak meningkat jauh melampau batas kewajaran, akibatnya kepentingan rakyat dalam usaha-usahanya akan lenyap (gulung tikar) karena apabila mereka membandingkan pengeluaran pajak dengan pendapatan mereka, serta melihat keuntungan kecil yang mereka dapatkan, mereka kehilangan semua harapan. Oleh karena itu pendapatan total pajak akan berkurang. Hingga akhirnya semua kewajiban dan pembebanan sampai pada puncaknya, dimana tidak ada lagi manfaat dan faedah serta fungsi dari pemungutan pajak itu sendiri hilang. Fungsi utama pajak yang diharapkan oleh semua rakyatnya yakni peningkatan kesejahteraan dan ketenteraman bagi

---

<sup>9</sup> M. Umer Chapra. *Masadepan Ilmu Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Prees, 2001), h. 284

warganya tidak akan terwujud dan Negara akan mengalami krisis keuangan dan krisis kepercayaan.<sup>10</sup>

## 2. Pajak merupakan alat mendorong investasi

Menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan memberikan insentif perpajakan sedemikian rupa sehingga dapat mendorong peningkatan investasi. Pemerintah memberikan kesempatan yang sangat luas kepada masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam investasi pajak sehingga pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama saling bahu membahu dalam mensukseskan program yang telah ada. Jadi investasi oleh subyek pajak pada hakikatnya merupakan instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat yang lemah yang membutuhkan yang sering disebut “*distribution of welfare*” (pemerataan kesejahteraan). Bagi pemerintah hal itu menjadi suatu “*social benefit*” (manfaat sosial).

Tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang semakin tinggi akan memberikan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan pajak sehingga memungkinkan pemerintah mengeluarkan anggaran yang lebih untuk kesejahteraan. Hal ini menimbulkan perluasan didalam lapangan ekonomi dan meningkatkan pembangunan.

Tanggung jawab pembangunan ada pada pemerintah dan masyarakat. Kedua-duanya harus terlibat langsung dan memikul pembangunan tersebut. Dalam kaitan ini untuk memperlancar jalannya pembangunan perlu

---

<sup>10</sup> Merza Gamal, *Pengkaji Sosial Ekonomi Islami*, <http://www.mail-archive.com@yahoogroups.com>

dikembangkan iklim investasi kepada rakyat dengan memberikan kepercayaan penuh kepada mereka agar pembangunan berjalan lancar. Partisipasi rakyat akan menjadi pengaruh yang sangat penting karena adanya partisipasi tersebut rakyat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan.

### 3. Pajak merupakan alat distribusi

Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. Peranan pajak sebagai alat distribusi sangat penting untuk menegakkan keadilan sosial dan menciptakan suasana yang nyaman bagi rakyatnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang semakin tinggi akan memberikan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan pajak sehingga memungkinkan pemerintah mengeluarkan anggaran yang lebih untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini akan menimbulkan perluasan lapangan kerja sehingga pendapatan perkapita akan meningkat dan distribusi menjadi tiang utama dari kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dalam hal mekanisme pemungutan pajak, Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa perlu dewan atau departemen khusus yang mengurus pajak dengan memiliki konsentrasi penuh dan komitmen yang tinggi untuk mengolah pajak tersebut. Dalam pandangan ini Ibnu Khaldun mengemukakan, Negara ada bagian-bagian dari pemerintah yang mengurus masalah-masalah ekonomi ini yang terpenting diantaranya adalah masalah mengurus pajak. Dalam bahasa Arab Ibnu Khaldun menamakan lembaga ini dengan (*Diwaan al-'Amal wa al-Jibayah*) mengenai hakikat dan tugas dari lembaga ini Ibnu

Khaldun menulis, “ketahuilah bahwa instansi ini adalah salah satu instansi yang sangat penting bagi kekuasaan Negara. Tugasnya adalah melaksanakan operasi pajak dan menjaga hak-hak Negara dalam hal yang berkenaan dengan pendapatan dan pengeluaran”. Ia juga membuat daftar nama anggota militer, menentukan gaji mereka, membayarkan pendapatan mereka pada waktu-waktu tertentu, dalam hal ini rujukannya adalah peraturan yang telah diatur oleh para pakar instansi itu dan para pejabat Negara.<sup>11</sup>

Dalam pandangannya Ibu Khaldun lebih lanjut menjelaskan bahwa badan yang mengurus pemungutan pajak ini baru terbentuk pertama kalinya didalam Negara ketika kekuatan serta kepentingan mereka didalam berbagai aspek kedaulatan dan didalam administrasi yang efisien telah tegak dengan kokoh. Dewan khusus yang dibentuk oleh pemerintah tersebut memiliki wewenang tertinggi dan mempunyai kebebasan mutlak untuk memungut, mengumpulkan dan memegang uang serta mengontrol kegiatan financial dan kemudian mengeluarkannya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan tepat pada waktunya. Ini dikenal dengan *al-Asyghal* (manajer bagian keuangan) atau sekarang lebih kita kenal di Indonesia dengan Direktorat Jendral Pajak.<sup>12</sup>

Para petugas pemungut pajak mengunjungi daerah-daerah tertentu berdasarkan hak hukum yang berlaku untuk waktu tertentu dan menentukan

---

<sup>11</sup> Ibnu Khaldun sangat mengutamakan hal ini sehingga dalam Muqaddimah diberikan bab khusus yang menjelaskan tentang dewan yang mengurus pajak baik dalam hal pemungutannya maupun dalam pendistribusiannya yakni dengan nama “(*Diwaan al-‘Amal wa al-Jibayah*)” *Op.cit.* h. 243-246

<sup>12</sup> *Ibid*

jumlah pajak yang wajar sesuai dengan kemampuan seorang wajib pajak. Pajak dikumpulkan baik dalam bentuk barang atau hasil bumi maupun berupa uang kontan. Jika barangnya tak tahan lama atau ada tanda-tanda turunnya harga dan nilai barangnya, petugas pajak berhak menjualnya. Seluruh pajak yang terkumpul kemudian dihimpun di sub-perbendaharaan propinsi. Sebagian atau seluruhnya dapat dibelanjakan untuk berbagai keperluan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini Ibnu Khaldun menekankan profesionalitas yang menjadi ciri khas dari pemikirannya. Sehingga dalam menentukan atau menetapkan orang yang bertugas dalam menangani masalah keuangan pajak ini haruslah orang yang mempunyai kejujuran dan tingkat keikhlasan yang tinggi ditunjang dengan profesionalitas yang dimilikinya. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman dibidangnya akan meningkatkan kinerja dan pendapatan pajak yang baik.

Ibnu Khaldun menyarankan harus adanya penyusunan anggaran dan peraturan yang tegas terhadap manajemen keuangan. Penerimaan itu berada dalam jaminan kepala pemerintahan, yang harus dengan sebaik-baiknya, dalam usaha yang dibenarkan syari'ah. Administator harus diangkat, jika urusan itu belum ada yang mengurusnya. Seorang inspektur jenderal harus diangkat untuk mengawasi seluruh administator sesuai dengan kebutuhan. Pengangkatan petugas itu menjadi urusan yang sangat penting dan merupakan

kebutuhan yang penting pula jika ketiadaan petugas itu akan membuat seluruh penerimaan Negara dibelanjakan secara tidak semestinya.<sup>13</sup>

Pemikiran Ibnu Khaldun dengan sesungguhnya mencerminkan trend pemikiran ilmuwan Muslim pada masanya mengenai distribusi yang adil dari beban pajak dengan mengutip sepucuk surat Tharir bin al-Husain kepada anaknya yang menjadi Gubernur disebuah provinsi :

*“Maka bagikanlah (pajak) kepada semua rakyat dengan adil dan wajar diberlakukan secara umum kepada siapa saja tanpa mengecualikan seseorang karena kehormatan dan kekayaannya, dan tidak mengecualikan sekalipun pegawaimu sendiri atau para keluarga istana atau para pengikutnya. Dan janganlah membebani seseorang dengan pajak diluar kemampuan orang tersebut untuk membayarnya”.*<sup>14</sup>

### **C. Manfaat Pemikiran Tentang Fungsi dan Mekanisme Pajak Menurut Ibnu Khaldun**

Pemerintah yang didukung oleh rakyatnya akan meluncurkan segala perencanaan-perencanaan yang telah dibuat. Bila ini berlanjut akan mendorong rakyat lebih giat lagi untuk melakukan aktifitasnya, sehingga dengan sendiri dampak yang akan dirasakan adalah pendapatan pajak yang selalu mengalami peningkatan. Tidak perlu dikhawatirkan akan keuangan Negara mengalami penurunan. Pendapatan pajak yang selalu mengalami peningkatan berpengaruh terhadap situasi pada peradaban Negara, yang akan tampak jelas dalam beberapa waktu mengalami perkembangan pembangunan Negara yang akan berkembang.

Ibnu Khaldun menjelaskan dalam kitabnya bahwa manfaat pemikirannya tentang fungsi dan mekanisme pajak itu adalah menghasilkan di

---

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 245

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 308

dunia dan di akhirat atas dasar ilmu syari'at dengan memaslahatkan Negara dan pemerintahannya serta memakmurkan rakyatnya. Artinya pemerintah yang akan bertanggung jawab kepada keamanan, pendidikan serta kesehatan rakyatnya oleh karenanya pemerintah harus bersikap jujur, adil agar disenangi oleh rakyatnya, apabila pemerintah telah disenangi rakyatnya maka rakyat akan terdorong membayar pajak dan pendapatan pun terus meningkat sehingga keuangan Negara tidak akan pernah defisit dan pembangunan bisa berjalan dengan lancar, sedangkan diakhirat akan mendapat balasan dari Allah Swt karena telah menjaga kemaslahatan orang banyak dan memberikan hak-hak orang lain.

Dan bisa juga memberikan manfaat di dunia saja dengan menegakkan keadilan, hak, hukum-hukum politik yang dapat mensejahterakan rakyat, apabila keadilan telah ditegakkan dan hak-hak rakyat serta hukum-hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya maka akan membawa kedaulatan yang makmur serta sejahtera. Sehingga rakyat dan pemerintah bisa kerja sama dalam mencapai maqasidnya, yaitu mencapai kedaulatan yang makmur nyaman dan sejahtera.<sup>15</sup>

Selanjutnya Ibnu Khaldun menjelaskan dalam hal kepemimpinan, bahwa seseorang yang diamanahkan sebuah kepemimpinan maka ia harus menjadi pelindung dan pemelihara bagi rakyatnya, dan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang telah diamanahkan kepadanya, maka ia tidak boleh mengambil bentuk apapun dari rakyatnya baik berupa hasil atau yang lainnya

---

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 303

tanpa dengan pekerjaannya, sekalipun kepemimpinan ditangannya namun hak rakyat harus diberikan kepada mereka, maka bagikanlah pajak kepada semua rakyat dengan adil dan wajar diberlakukan secara umum kepada siapa saja tanpa mengecualikan seseorang karena kehormatan dan kekayaan, dan tidak mengecualikan sekalipun pegawaimu sendiri atau para keluarga istana atau para pengikutnya. Dan jangan membebani seseorang dengan pajak yang diluar kemampuan orang tersebut untuk membayarnya.<sup>16</sup>

Ketika Negara dan rakyatnya telah sejalan dalam menciptakan kedaulatan yang adil dan sejahtera, maka Negara akan mudah mengumpulkan pajak dari rakyatnya. Ibnu Khaldun lebih jauh menjelaskan bahwa apabila uang (pajak) telah terkumpul dan melimpah ruah maka hendaklah tidak digunakan kecuali untuk kemaslahatan rakyat serta memberikan hak-hak mereka dan menutupi kekurangan mereka hingga dapat memaslahatkan Negara dengan mengembangkan wilayahnya dan memperbaiki keadaan-keadaan rakyatnya sehingga tercapai Negara yang adil, makmur dan sejahtera.<sup>17</sup>

Ibnu Khaldun salah seorang tokoh pemikiran yang sangat populer, Ibnu Khaldun mempunyai pola emperisme positivisme karena berisi kajian tentang sejarah, politik sosiologi dan ekonomi serta dalam mengungkapkan

---

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 308

<sup>17</sup> *Ibid*



sebuah teori Ibnu Khaldun melihat keadaan yang terjadi disekelilingnya serta dengan pengalaman dari perjalanan hidupnya.<sup>18</sup>

Setelah kita membahas tentang pemikiran fungsi dan mekanisme pajak Ibnu Khaldun penulis akan menganalisa agar lebih mendalam tentang pengetahuan penulis tentang pajak Ibnu Khaldun. Pengertian pajak Ibnu Khaldun yang berarti *Jibayah* yang berarti pembebanan, atau pembebanan pemerintah bagi masyarakatnya. Pengertian ini jelas sesuai dengan pengertian penulis yaitu pembebanan pemerintah terhadap masyarakat dimana masyarakat tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah.

Sedangkan landasan pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak itu adalah ketika kita ingin mendirikan sebuah negara maka perlu bantuan atau solidaritas masyarakat agar pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahannya tanpa bantuan dari rakyat pemerintah tidak akan bisa menjalankan program-programnya. Masyarakat harus bersatu tanpa membedakan suku, Agama yang terpenting adalah integritas bangsa. Hubungan sebuah negara dengan solidaritas masyarakat juga tidak bisa dipisahkan, tanpa bantuan dari masyarakat negara tidak akan bisa berdiri. Oleh karena itu masyarakat sangat dibutuhkan pemerintah begitu juga pemerintah juga diperlukan masyarakat jadi kaitan diantara keduanya saling ketergantungan.

Ketika negara sudah mewah pendapatan sudah melimpah luah, maka peluang untuk ketidak adilan sangat luas. Ibnu Khaldun menjelaskan

---

<sup>18</sup> Fuad Baali dan Ali Wardi, *Op.cit.* h. 40

pemerintah itu tidak akan selamanya positif terkadang akan membawa dampak yang negatif yaitu hilangnya sifat kejujuran dan keadilan dan terkadang pemerintah lupa sehingga hidup bermewah-mewah yang akan mengakibatkan sebuah kehancuran. Oleh karena itu tegak dan runtuhnya suatu negara itu terletak pada pemerintahannya. Apabila pemerintahannya menjalankan fungsi pajak sesuai pada ketentuannya ditambah pemerintahan yang adil, jujur amanah maka tidak akan ada masyarakat yang kelaparan, serta tidak akan terjadi krisis keuangan pada negara itu dan masyarakat akan makmur dan sejahtera.

Perkembangan selanjutnya adalah timbulnya jenis pemerintahan yang merupakan kekuasaan yang menindas dengan budaya yang menyeru untuk bersifat tidak jujur, diwaktu itu para pejabat Negara mulai hidup secara berlebihan hingga keadaan dan kebutuhan mereka itu menjadi lebih banyak karena mereka telah tenggelam dalam kenikmatan hidup dan kemewahan, mereka menambah jumlah pajak dari pungutan rakyat, para petani dan buruh perkebunan, serta semua wajib pajak. Setiap gaji dan pendapatan yang dikenakan pajak yang lebih besar, agar jumlah pajak yang mereka kumpulkan bertambah banyak.

Pertambahan pajak ini selalu terjadi dari jumlah yang satu kepada jumlah yang lain, karena semakin besarnya kebutuhan Negara untuk kemewahan yang menyebabkan semakin banyak pula kebutuhan pengeluaran, akhirnya rakyat merasa bahwa pajak itu telah terlalu berat membebani mereka dan telah menjadi suatu hal yang dipaksakan sebabnya adalah karena

pertambahan itu dilakukan sedikit demi sedikit, dan orang tidak tahu lagi siapa yang menetapkan dan siapa yang memutuskannya. Akan tetapi rakyat telah merasa pasti bahwa pertambahan pajak itu lah menjadi suatu keharusan kemudian bertambah lagi sehingga menjadi berat untuk dipikul.

Ibnu Khaldun melihat bahwa pengaruh pajak yang selalu bertambah berat ini dapat terlihat ketika rakyat tidak bergairah lagi dalam berusaha, karena semangat sudah hilang dari jiwa mereka, rakyat melihat bahwa manfaat yang mereka peroleh dari berusaha itu telah menjadi sedikit sekali, terutama apabila dibandingkan antara untung dan ruginya, yaitu antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang harus dipikul. Banyak dari tenaga kerja sama sekali tidak mau bekerja lagi, karena itu jumlah pajak menurun, karena berkurangnya pendapatan yang dapat dibebani pajak.

Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakannya itu, Ibnu Khaldun menganjurkan bahwa setelah memahami segala hal ini, maka tindakan yang paling baik untuk kepentingan pembangunan adalah mengadakan sedikit mungkin jumlah pajak atas orang-orang yang bergerak dibidang pembangunan ini serta harus menegakkan keadilan, Abu Yusuf juga berpendapat bahwa suatu sistem pajak yang adil tidak hanya akan menimbulkan peningkatan pendapatan, melainkan juga pembangunan negara.<sup>19</sup>

Ibnu Khaldun mengemukakan bagaimana eratnya hubungan antara pajak yang dibebankan kepada rakyat dan semangat untuk berusaha dan memproduksi, apabila pajak terlalu berat, rakyat akan kehilangan gairah dan

---

<sup>19</sup> M. Umer Chapra. *Op.cit.* h. 286

semangat untuk bekerja dan berkaya mereka menyadari bahwa hasil yang mereka peroleh dari bekerja keras itu tidak akan mereka nikmati sendiri, akan tetapi semuanya kita akan pergi ke kas Negara dalam bentuk pajak.

Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa pemerintah harus mempunyai sifat profesional serta jujur dan adil dalam mengumpulkan pajak tersebut, ketika pemerintah adil serta jujur dalam hal pemungutan serta pendistribusiannya maka akan tercapai negara yang makmur dan sejahtera.

Sejalan dengan pendapat para fuqaha klasik yang mendukung perpajakan, mereka hanya melihat sistem pajak yang adil, suatu sistem pajak dipandang adil apabila memenuhi tiga kriteria yaitu :

- 1 Pajak dipungut untuk membiayai apa yang dipandang mutlak diperlukan untuk mewujudkan *maqasid*.
- 2 Beban tidak boleh sama sehubungan dengan kemampuan orang untuk memikulnya, dan harus didistribusikan merata diantara mereka yang mampu membayar.
- 3 Dana pajak yang terkumpul harus dipergunakan setulusnya untuk tujuannya.<sup>20</sup>

Para fuqaha sepakat bahwa zakat sangat jauh berbeda dengan pajak. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim terhadap agama seperti sholat, puasa dan haji. Dana zakat yang terkumpul tidak dapat dipergunakan oleh negara untuk tujuan-tujuan yang diinginkannya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 286

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 282

Pada awal pemerintahan Islam yang dipimpin oleh khalifah Abu Bakar Ash Siddiq telah memerangi orang-orang yang menolak zakat sebagaimana telah memerangi kaum murtad yang mengikuti orang-orang yang mengaku nabi seperti Musilamah dan Sajjaj. Sebagaimana perkataan Abu Bakar Ash-Siddiq :

فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقْلًا كَانُوا يُؤْذُونَهُ  
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ . فَقَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ  
شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْفِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ . قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنَّا

“ Demi Allah sungguh saya akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat, maka sesungguhnya zakat hak dari harta. Demi Allah seandainya mereka menolak kepadaku untuk membayar zakat meskipun sebanyak tali kendali unta yang pernah mereka tunaikan kepada Nabi Muhaad. Niscaya aku akan memeranginya dengan sebab tersebut. (H.R.Shoheh Bukhari)”<sup>22</sup>

Oleh karena itu membayar zakat pada masa itu sangat ditekankan khalifah kepada kaum muslim.

Zakat yang dikumpulkan dari kaum kaya yang mempunyai kesanggupan untuk mengeluarkannya dan diserahkan kepada kaum fakir.

Sebagaimana yang telah ditentukan Allah dalam Al-qur'an. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

<sup>22</sup> H.R. Shoheh Bukhari. No. 7285

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>23</sup>

Selanjutnya orang yang mengelola zakat disebut dengan *Amil* atau orang yang paham dengan agama. Sehingga fungsi zakat terarah kepada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi umat Islam dan memerangi kelaparan dan ketakutan.<sup>24</sup>

Sedangkan pajak pada awal pemerintahan Islam hanya dibebankan kepada kaum kafir saja. Seperti *jizyah*, *kharaj* dan *usur*. Pajak boleh dipungut kepada kaum muslim pada dasarnya untuk menciptakan kesejahteraan umat masyarakat serta untuk membangun sebuah negara, ini sejalan dengan pendapat para sekelompok ulama yang membolehkan pajak dipungut dari kaum muslim. Selanjutnya hubungan zakat dengan pajak sangat jauh berbeda. Zakat hubungannya dengan urusan *religius*. Sedangkan pajak hubungannya dengan duniawi.<sup>25</sup>

Ibnu Khaldun menegaskan agar pemungutan pajak didasarkan atas tingkat kemampuan individu, yaitu pembebanan pajak sesuai dengan

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang, Toha Putra, 1989), h. 288

<sup>24</sup> Yusf Qardhawi, *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*, (Pasar Rebo Jakarta : Robbani Press). h. 419

<sup>25</sup> M.A Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dan Bahkti Wakaf). h. 247

pendapatan wajib pajak. Adapun alasan Ibnu Khaldun membebankan pajak kepada muslim maupun non Muslim adalah karena melihat jika diharapkan dari zakat niscaya pemerintah tidak akan bisa menjalankan roda-roda ke pemerintahannya oleh karena itu Ibnu Khaldun membebankan pajak kepada Muslim maupun non Muslim dengan dasar setiap yang mempunyai objek pajak maka dia dikenakan pajak.<sup>26</sup>

Selanjutnya pengelolaan pajak yang dikelola pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Petugas pajak ini harus mempunyai sifat profesionalitas dibidang perpajakan. Ibnu Khaldun menamakan dengan *Diwaan al-‘Amal wa al-Jibayah*. Ruang lingkup pajak lebih luas dibandingkan dengan zakat dan pada hakekatnya pajak dipergunakan untuk kebutuhan duniawi serta untuk membangun sebuah negara.<sup>27</sup>

Oleh karena itu telah jelas terlihat bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak yaitu menekankan kepada pemerintah agar sifat adil, jujur serta profesional baik dalam segala bidang terutama dalam pemungutan serta pendistribusian pajak, sehingga fungsi, manfaat serta mekanisme pajak itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Yaitu untuk membantu masyarakat yang lemah yang membutuhkan yang sering disebut “*distribution of welfare*” (pemerataan kesejahteraan). Sehingga masyarakat dapat hidup dalam ketenangan serta ketenteraman dan akan membawa kesejahteraan.

---

<sup>26</sup> Ibnu Khaldun, *Op.cit* h. 279

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 245





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dasar pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak, bahwa ketika ingin mendirikan sebuah Negara harus ditegakkan dengan solidaritas masyarakat yang tinggi yang mementingkan integritas dalam ber Negara, tanpa membedakan antara Suku, Agama dan lainnya. Disini Ibnu Khaldun dengan cerdas menjelaskan kehancuran sebuah Negara itu yang datang melalui uang (pajak). Oleh karena itu pemerintah harus menjauhkan diri dari sifat kemewah-mewahan.
2. Fungsi dan mekanisme pajak menurut Ibnu Khaldun dibagi kedalam tiga macam, yaitu sebagai alat atau instrumen pendapatan Negara, alat mendorong investasi dan alat distribusi. Sedangkan dalam hal mekanisme pemungutan pajak, Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa perlu dewan atau departemen khusus yang mengurus pajak dengan memiliki konsentrasi penuh dan komitmen yang tinggi untuk mengolah pajak, yang Ibnu Khaldun namakan dengan (*Diwaan al-‘Amal wa al-Jibayah*)
3. Manfaat pemikiran tentang fungsi dan mekanisme pajak menurut Ibnu Khaldun menjelaskan dalam kitabnya adalah menghasilkan di dunia dan di akhirat atas dasar ilmu syari’at dengan memaslahatkan Negara dan pemerintahannya, serta menegakkan keadilan, hak dan hukum-hukum politik yang dapat mensejahterakan rakyatnya.

## **B. Saran**

Setelah penulis meneliti pemikiran Ibnu Khaldun tentang fungsi dan mekanisme pajak, penulis ingin memberikan saran kepada :

- 1 Segenap pakar ekonomi Islam hendaknya dapat meneliti lebih lanjut pendapat-pendapat dari Ibnu Khaldun agar dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.
- 2 Instansi pemerintahan terutama yang menangani perpajakan, pendapat Ibnu Khaldun ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengelola pajak dengan benar dan tepat pada tujuannya.
- 3 Kemudian bagi para masyarakat agar lebih giat membayar pajak karna pajak yang dipungut dari rakyat akan dikembalikan kepada rakyat yang akan membawa dampak masyarakat yang sejahtera.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Timiyah*, (terj) Anshari Tayib, ( Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang, Toha Putra, 1989)
- Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan pola pemikiran Islam*, ( Jakarta : Penerbit Pustaka Firdaus, 1989)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Gazi Inayah, *Teori Komprenship Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 2003)
- H. Adiwarmen Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, Persada, cetakan pertama, 2004)
- Husein 'asiy, *Ibnu Khaldun Muakhkhoron*, (Birrut Libanon. 1991)
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* ( Beirut : Daar Fikr)
- Karnaen A. Perwataatmadja. *Jejak Rekam Ekonomi Islam*. (Jakarta : Cet. Pertama)
- M.A Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dan Bahkti Wakaf)
- Monzer Khaf, *Ekonomi Islam :Telaah Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Islam*, (terj), Macnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- M. Umer Chapra, *The Future of Economics An Islamic Perspective (Landcape Baru Perekonomian Masa Depan*, (Jakarta : Penerbit SEBI , 2001)
- Merza Gamal, *Pengkaji Sosial Ekonomi Islami*, <http://www.mail-archive.com@yahoogroups.com>
- Moch Abdullah Enan, *Ibnu Khaldun His Life and Work*, (Lahore : Kashmiri Bazar, 1946)
- Muhsin Mahdi, *Ibnu Khaldun's Philosophy of History A Study in the philosopic Foundation of the Scifnce of culture*, (London : George Allen and Unwim Ltd, t.t)
- Mardiamso, *Perpajakan*, (Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2008)

Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Suska Press : 2008 )

M.Ali. Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*.(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

M. Umer Chapra. *Masadepan Ilmu Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)

Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Yusf Qardhawi, *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*,(Pasar Rebo Jakarta : Robbani Press)